

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan komponen penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi nasional. Melalui pembangunan daerah, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pembangunan yang merata menjadi kunci terciptanya stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat nasional. Salah satu sumber pembiayaan utama pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Anthony & Rohman, (2024) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat besar sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan di tingkat pemerintah daerah. PAD berfungsi sebagai instrumen penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan lainnya. Melalui PAD, pemerintah daerah memperoleh kemampuan untuk melaksanakan pembangunan secara lebih mandiri dan menyesuaikan prioritasnya dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Terdapat isu yang terdapat di *Tribunjateng.com* yang menyatakan pengendapan uang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa

Tengah mengacu pada kondisi ketika sebagian dana PAD tidak segera dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan maupun kebutuhan operasional daerah. Dana tersebut umumnya tersimpan dalam bentuk saldo rekening bank atau instrumen deposito pemerintah daerah. Fenomena ini menjadi sorotan karena Provinsi Jawa Tengah memiliki capaian PAD yang relatif tinggi rata-rata berada pada kisaran Rp 13,9 triliun per tahun selama periode 2019–2023 yang di lihat dari data aktual dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada web *Kemenkeu.go.id - LKPD Jawa Tengah*. Namun, sebagian dari dana tersebut tidak langsung direalisasikan sehingga memunculkan indikasi inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Subekti, (2025) Purbaya Yudhi Sadewa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa hingga triwulan III tahun 2025, total dana milik pemerintah daerah yang masih tersimpan atau “mengendap” di perbankan mencapai sekitar Rp234 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat porsi besar anggaran daerah yang belum terserap secara optimal untuk mendukung program pembangunan maupun pelayanan publik.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan rendahnya serapan anggaran, tetapi juga mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam efektivitas pelaksanaan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya penerapan otomasi sistem pemerintahan daerah. Meskipun pemerintah telah

mendorong digitalisasi melalui berbagai inovasi seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), implementasinya di berbagai daerah masih belum berjalan optimal.

Otonomi daerah di Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerapan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk lebih mandiri dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah semakin diperluas, tidak hanya dalam aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan pembangunan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dengan adanya kewenangan ini, diharapkan setiap daerah mampu merancang strategi pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mendukung perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, desentralisasi fiskal merupakan proses penyerahan kewenangan di bidang fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diberi hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta

mengelola keuangannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya bersifat terpusat. Kewenangan tersebut, baik dalam pengelolaan administrasi maupun pemanfaatannya, yang semula diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi. Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan dana melalui kementerian atau lembaga dengan mekanisme dekonsentrasi melalui aparat perwakilan di daerah. Di sisi lain, daerah juga diberikan keleluasaan (diskresi) untuk menggali sumber pendapatan sendiri, termasuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (Elva Dona, Gentha Gautama, 2022).

Pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah adalah cara daerah dapat memanfaatkan potensi fiskal lokal melalui mekanisme ini. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam PAD. Namun demikian, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, pemerintah pusat terus memberikan Dana Perimbangan kepada daerah karena kapasitas fiskal daerah tidak sama. Diharapkan juga bahwa dana tersebut akan diarahkan ke belanja modal, yang secara langsung terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur.

Kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas sangat ditentukan oleh seberapa efektif desentralisasi fiskal

dijalankan. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih responsif sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendorong pembangunan yang inklusif. Namun, untuk mencapai kemandirian fiskal yang ideal bukanlah hal yang mudah, karena berbagai tantangan dalam implementasi masih sering dihadapi di tingkat daerah (Jaya, 2021). Perbedaan kapasitas fiskal dan kemampuan manajerial antar-daerah seringkali menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa alokasi dana benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi sangat penting dalam menganalisis sejauh mana PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang lebih produktif, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah berkonsentrasi pada peningkatan ekonomi lokal dengan menggunakan berbagai instrumen fiskal. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian lokal melalui kewenangan fiskal

yang dimilikinya. Dalam hal ini, kemampuan mengelola pendapatan daerah serta ketepatan dalam mengalokasikan belanja menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan (Prawoto et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas basis penerimaan daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi ukuran kuantitatif atas kinerja pembangunan, tetapi juga mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya, kebijakan fiskal, serta strategi pembangunan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, daerah mampu meningkatkan daya saing, menarik investasi, serta memperkuat basis fiskal yang pada akhirnya mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik (Amdan & Sanjani, 2023). Dalam konteks tersebut, peran PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal menjadi instrumen fiskal strategis yang perlu dianalisis secara simultan karena kontribusinya sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi daerah.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional memiliki dinamika pembangunan yang menarik untuk dikaji dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa, Jawa Tengah dituntut untuk mampu menyediakan layanan publik yang merata sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonominya (Sari, 2021). Data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Tengah tumbuh cukup solid, yakni sebesar 5,41 persen pada 2019. Namun, pandemi yang melanda pada 2020 memberikan tekanan berat terhadap aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhan daerah ini berkontraksi hingga 2,65 persen. Kondisi tersebut mulai membaik pada 2021 dengan pertumbuhan 3,32 persen, kemudian meningkat signifikan menjadi 5,31 persen pada 2022, meskipun sedikit melambat pada 2023 dengan capaian 5,04 persen. Pola fluktuasi ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi Jawa Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi, tetapi juga erat kaitannya dengan efektivitas pengelolaan fiskal daerah, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam menopang pemulihan serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, sumber pendapatan daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan ini dibagi menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD adalah indikator utama kemandirian fiskal daerah, semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan total daerah, semakin kuat kemandirian keuangan daerah tersebut. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui alokasi dana yang mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor produktif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah karena sumber penerimaan ini tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyediaan layanan publik sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat. Lebih jauh, PAD juga mencerminkan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya, sehingga dapat menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, strategi pengelolaan PAD yang efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika lokal sangat diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat otonomi fiskal di tingkat local (Aqnisa, 2017).

Selain PAD, terdapat Dana Perimbangan berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD yang dialokasikan untuk daerah sebagai salah satu instrumen pendanaan dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah. Komponen dana ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditujukan untuk membantu daerah dalam pembiayaan pembangunan serta penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan dana pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan

memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Jepun & Dwi Setyadhi, 2023).

Melalui Dana Perimbangan, pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya agar tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sesuai kewenangannya. Instrumen ini berperan penting dalam menyeimbangkan kapasitas keuangan antar daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya sumber pendapatan daerah lainnya, dana perimbangan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, terutama melalui belanja langsung. Penggunaan dana tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah (Lestari et al., 2023). Berikut Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tabel 1.1 Penyerapan Pendapatan Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
2019	Rp 26.333.746.838.000	Rp 25.986.244.000.000	98,68%
2020	Rp 26.204.164.506.000	Rp 25.393.556.000.000	96,91%
2021	Rp 27.036.122.274.000	Rp 26.635.246.000.000	98,52%
2022	Rp 25.125.002.500.000	Rp 24.168.017.000.000	96,19%
2023	Rp 27.482.744.908.000	Rp 25.369.913.000.000	92,31%

Menurut (Jateng, 2025) Pada 2019, realisasi pendapatan mampu mencapai 98,68 persen dari target yang ditetapkan, namun pada 2020 angka tersebut menurun menjadi 96,91 persen akibat melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi Covid-19. Kondisi sempat membaik pada 2021 dengan capaian 98,52 persen, tetapi kembali mengalami penurunan pada 2022 menjadi 96,19 persen, bahkan turun lebih tajam pada 2023 dengan tingkat penyerapan hanya 92,31 persen. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun nominal pendapatan daerah relatif stabil, efektivitas penyerapan masih menghadapi tantangan, terutama dalam periode pasca pandemi. Rendahnya tingkat penyerapan berpotensi mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga menjadi faktor penting untuk diperhatikan dalam analisis mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Fluktuasi dalam realisasi pendapatan daerah mencerminkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan potensi sumber penerimaan yang dimiliki. Ketidakmaksimalan tingkat penyerapan pada tahun-tahun tertentu berpotensi mengurangi kapasitas fiskal daerah dalam mendukung

pembiayaan belanja publik, termasuk belanja modal yang sejatinya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Fitriyanti & Handayani, 2020). Kondisi ini semakin menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai sejauh mana kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pendapatan, belanja daerah, khususnya belanja modal, berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam belanja secara langsung terdiri dari 3 komponen yaitu, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk investasi, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun pengadaan aset tetap, dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas pelayanan publik. Apabila dikelola secara efektif, Belanja Modal dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.

Pengeluaran belanja modal ini umumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan yang memiliki kontribusi jangka panjang terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Investasi dalam bentuk belanja modal tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga mampu menurunkan biaya produksi, memperluas akses pasar,

serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, belanja modal berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Jayanti, 2020)

Namun demikian, efektivitas belanja modal tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, transparansi dalam proses pengadaan, serta efektivitas pemeliharaan aset yang dihasilkan. Belanja modal yang dirancang tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan ekonomi lokal berpotensi menghasilkan infrastruktur yang kurang termanfaatkan, sehingga tidak memberikan multiplier effect yang optimal terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, keberhasilan belanja modal sebagai instrumen pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menyesuaikan investasi dengan potensi dan prioritas pembangunan daerahnya (Pasal Bessy & Setiadi, 2023).

Alokasi Belanja Modal mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi fondasi pembangunan, mulai dari jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur pendukung lainnya yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan porsi Belanja Modal diharapkan mampu menghasilkan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, baik melalui peningkatan produktivitas, penciptaan kesempatan kerja, maupun peningkatan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, efektivitas dalam merencanakan

dan mengelola Belanja Modal menjadi faktor kunci bagi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan angka-angka statistik, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Suci, 2023).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk dan cakupan wilayah yang cukup besar, sehingga menempatkannya sebagai daerah yang memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional. Pada periode 2019–2023, Jawa Tengah menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan realisasi PAD, serta terhambatnya optimalisasi Belanja Modal. Namun, pasca pandemi, perekonomian Jawa Tengah mulai menunjukkan tren pemulihan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan PDRB.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan wilayah geografis yang cukup luas, yang secara tidak langsung turut memengaruhi dinamika perekonomiannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan potensi wilayah dan aktivitas ekonomi yang dimilikinya, provinsi ini menjadi salah satu penopang penting dalam struktur perekonomian Indonesia (Rini & Rifki, 2020). Data empiris menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi sepanjang periode penelitian, yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal maupun

kebijakan internal pemerintah daerah. Perubahan dalam alokasi Dana Perimbangan serta upaya peningkatan PAD menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan pelayanan publik. Interaksi antara peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja modal inilah yang pada akhirnya menentukan sejauh mana Jawa Tengah mampu menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, kajian mengenai hubungan antara PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah menjadi relevan sebagai dasar analisis empiris dalam penelitian ini.

Di Provinsi Jawa Tengah, alokasi belanja modal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif. Walaupun porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbilang cukup signifikan, realisasi penggunaannya masih sering menghadapi kendala sehingga belum sepenuhnya optimal (Marheni & Triyanto, 2023). Berbagai faktor turut memengaruhi kondisi ini, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tingginya ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, serta hambatan teknis yang muncul dalam proses pelaksanaan program dan proyek pembangunan.

Rendahnya proporsi maupun realisasi belanja modal dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembangunan daerah. Sebaliknya, ketika belanja modal dialokasikan secara tepat pada sektor-sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta

layanan publik lainnya pengaruh yang dihasilkan mampu memberikan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, pengelolaan alokasi belanja modal yang efektif menjadi krusial agar pengeluaran daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar mendukung peningkatan produktivitas, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah (Rowena & Hanifa, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji keterkaitan antara variabel fiskal dan kinerja ekonomi maupun keuangan daerah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2024) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013–2017 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam menghimpun PAD serta mengalokasikan belanja modal secara efektif, maka semakin baik pula kinerja keuangannya. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa kebijakan fiskal daerah yang sehat berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut penelitian sebelumnya Saputra et al., (2023); Wahyu Luthvia et al., (2023) menyatakan bahwa PAD tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PAD tidak selalu menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian besar PAD digunakan untuk membiayai

belanja rutin seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan. Akibatnya, dampak PAD terhadap peningkatan produktivitas ekonomi relatif kecil. Selain itu, PAD tidak dapat secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi karena kurangnya inovasi dalam pengembangan sumber pendapatan lokal, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan pengelolaan pendapatan daerah yang tidak efisien.

Sementara itu, Malau & Simarmata, (2020); Suci, (2023) berpendapat Pengembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung usaha ekonomi dan pembangunan. Terutama di wilayah dengan basis industri yang kuat seperti Kabupaten Semarang dan Kota Pekalongan, PAD terutama berasal dari pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor.

Ada juga peneliti mengenai pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut (Rahmawati, 2024; Alifah et al., 2023) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan Belanja modal memiliki pengaruh parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. setiap komponen pendapatan daerah mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan aset dan infrastruktur publik. Secara khusus, dana perimbangan yang berasal dari pemerintah terbukti berperan besar dalam

meningkatkan kemampuan fiskal daerah karena menjadi sumber utama pembiayaan proyek-proyek pusat pembangunan yang produktif.

Dengan memahami keterkaitan antara PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perumusan kebijakan, khususnya dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik yang memperkaya literatur terkait ekonomi daerah, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui pendekatan empiris yang komprehensif, penelitian ini berusaha menghadirkan gambaran yang lebih jelas mengenai peran instrumen keuangan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus inklusif di Provinsi Jawa Tengah.

Periode penelitian 2019–2023 dipilih karena merepresentasikan fase penting dalam dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Tengah, yakni mencakup masa sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19. Tahun 2019 menggambarkan kondisi ekonomi yang relatif stabil sebelum adanya guncangan global, dengan kebijakan fiskal daerah berjalan dalam situasi normal. Memasuki tahun 2020, pandemi Covid-19 menimbulkan tekanan besar terhadap perekonomian daerah, ditandai dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian alokasi Dana Perimbangan, serta perubahan prioritas Belanja Modal untuk mendukung penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kondisi ini

menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan. Sementara itu, periode 2021 hingga 2023 mencerminkan fase pemulihan dengan berbagai upaya konsolidasi fiskal dan pembangunan yang diarahkan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, rentang waktu penelitian ini memberikan ruang analisis yang komprehensif mengenai bagaimana PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berperan dalam menghadapi krisis serta mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Tengah.

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, Jawa Tengah dipandang relevan untuk dijadikan objek studi dalam menganalisis pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode 2019–2023. Oleh karena itu, kajian tentang hubungan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi menjadi krusial. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas kebijakan fiskal dan arah investasi daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi Jawa Tengah.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya masih bersifat parsial. Sebagian hanya menyoroti keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, sementara yang lain lebih menitikberatkan pada peran Dana Transfer atau Dana Perimbangan tanpa menghubungkannya dengan

variabel fiskal lainnya. Pendekatan yang terfragmentasi tersebut tentu memberikan pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana mekanisme fiskal daerah bekerja secara utuh. Padahal, dalam realitasnya, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak berdiri di atas satu instrumen pembiayaan saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang saling melengkapi antara berbagai sumber pendapatan dan kebijakan belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang menganalisis secara simultan pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketiga komponen ini berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Namun, mengingat karakteristik ekonomi dan struktur fiskal Provinsi Jawa Tengah yang berbeda, penelitian yang komprehensif harus dilakukan untuk menyelidiki pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersamaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk membantu pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji hubungan empiris semata, melainkan juga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran fiskal daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan empiris yang memperhitungkan dinamika temporal serta karakteristik lokal Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan literatur kebijakan fiskal daerah, sekaligus menjadi acuan dalam praktik perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, terlihat adanya perbedaan temuan di antara para peneliti mengenai hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan kajian lebih lanjut guna mempertegas dan memperkaya pemahaman terhadap dinamika hubungan ketiga variabel tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan ekonomi daerah yang beragam, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama periode 2019–2023, penulis merasa perlu untuk meneliti kembali topik ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah Selama Periode 2019–2023.”***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?
4. Apakah PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal berpengaruh simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Selain itu penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan mengidentifikasi hubungan serta dampak dari masing-masing komponen keuangan

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023.
- b. Untuk mengkaji pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2023.
- c. Untuk menilai kontribusi Belanja Modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2023.
- d. Untuk menelaah sejauh mana PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019–2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait kajian ekonomi pembangunan dan keuangan daerah, dengan manfaat sebagai berikut:

- a. Memperkaya literatur mengenai hubungan antara komponen penerimaan daerah (PAD dan dana perimbangan) serta belanja modal dengan kinerja ekonomi daerah. Penelitian ini dapat memperjelas mekanisme teoritis bagaimana sumber pembiayaan daerah dan pola pengeluaran publik mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi.
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman teoretis mengenai fungsi dana perimbangan baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dalam mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah serta meningkatkan kapasitas investasi publik. Kajian ini juga membantu menjelaskan apakah dana perimbangan lebih berperan sebagai instrumen stimulus pertumbuhan jangka pendek atau justru sebagai mekanisme redistribusi fiskal yang berdampak dalam jangka panjang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam kajian ekonomi pembangunan daerah, terutama mengenai keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi.
- d. Penelitian ini menegaskan relevansi teori desentralisasi fiskal dalam menjelaskan bagaimana kemandirian fiskal daerah melalui PAD serta transfer dari pusat berupa Dana Perimbangan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

- e. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi selanjutnya yang berfokus pada penggunaan metode ekonometrika maupun pendekatan moderasi atau mediasi dengan variabel pembangunan daerah lainnya.
- f. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkaya teori pembangunan regional dengan menambah bukti empiris serta interpretasi teoretis mengenai pengaruh variasi struktur penerimaan dan belanja antar kabupaten/kota di dalam provinsi. Temuan tersebut dapat memperjelas bagaimana kebijakan fiskal pada tingkat subnasional berperan dalam memengaruhi disparitas pertumbuhan antarwilayah, sekaligus memperkuat pemahaman akademik mengenai dinamika keuangan daerah dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas pemanfaatan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil temuan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan APBD yang lebih optimal dan produktif.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan Dana Perimbangan yang lebih efektif dan tepat sasaran sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.

c. Bagi Akademis dan Peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai sumber acuan ilmiah yang relevan bagi kajian di bidang akuntansi sektor publik, ekonomi pembangunan, dan kebijakan fiskal daerah.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa optimalisasi PAD serta pemanfaatan belanja modal yang tepat sasaran dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.